

ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI TERHADAP UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Moch.Sulchan¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
sulkhanmoch@gmail.com

Maya Zulfa Maslihatin²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
mayazulfamm@gmail.com

Ely Sekar Sari³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
ellysekar28@gmail.com

Anik Yulikhah⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
anikazwar@gmail.com

Agus Eko Sujianto⁵

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
agusekosujianto@gmail.com

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
8 Oktober 2020

Tanggal Revisi:
10 September 2020

Tanggal Diterima:
20 Desember 2020

Publikasi On line:
1 Maret 2021

The global economic crisis due to the Corona virus outbreak or the Covid-19 pandemic, logistics, tourism and trade activities are the sectors that have had the greatest impact from the Corona virus outbreak. The micro small and medium business sector (UMKM) is also very much affected by the covid-19 virus pandemic. Meanwhile, the UMKM sector absorbed very large employment and contributed to a very large GDP of 60%. To overcome this, the government provides targeted stimulus to the tourism industry, and to re-structure UMKM credit, in addition to that a call center is also provided to hear reports and complaints about UMKM actors. For this reason, the government is very influential in making regulations for the Indonesian economy, especially for UMKM. This short article tries to analyze how the government's strategies and policies in providing stimulus to covid -19.
Keywords: strategy, UMKM, Covid-19

Abstrak

Keadaan ekonomi global saat ini sudah dapat dipastikan krisis dikarenakan wabah virus Corona atau pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan ekonomi logistik, perdagangan dan pariwisata merupakan sektor yang memiliki dampak signifikan dari tersebarnya wabah virus Corona. Terutama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga sangat terdampak dengan adanya pandemi virus covid-19 ini. Sementara itu, sektor UMKM menyerap lapangan kerja cukup besar dan menjadi penyumbang PDB sangat besar sebesar yaitu sekitar 60%. Sehingga pemerintah perlu memberikan stimulus pada UMKM berupa restrukturisasi kredit, dan juga menyediakan call center untuk mendengar berbagai aduan dan laporan keluhan dari pelaku UMKM terdampak darurat COVID-19. Untuk itu, pemerintah sangat berpengaruh dalam pengambilan regulasi bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM. Tulisan pendek ini mencoba menganalisa bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Kata kunci : strategi, UMKM, Covid-19

PENDAHULUAN

Dampak dari merebaknya virus covid-19 yang sekarang menjadi sebuah pandemi di seluruh penjuru dunia sangat berpengaruh pada segala aspek. Tak terkecuali pada aspek perekonomian Indonesia. Produksi menjadi turun, barang menjadi langka dan harga akan melonjak naik, yang mengakibatkan tingginya angka inflasi, terutama disebabkan karena ekspor dan impor bahan baku juga barang modal terdampak pandemi covid-19 secara luas. Sedangkan, bahan baku di negara Indonesia masih masih ketergantungan dengan cina di tambah dengan pandemi covid 19 membuat peredaran bahan baku mengalami kendala dalam pendistribusiannya.. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Teknologi komunikasi dan persebaran informasi yang sangat cepat juga menampak efek

buruk dari pandemi covid -19 ini. Informasi yang berkembang cepat tersebut, telah menimbulkan kepanikan yang dahsyat dan merubah pola perilaku masyarakat, yang salah satunya mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran.

Pandemi covid-19 yang berdampak pada tatanan ekonomi global, akan berimplikasi pula terhadap ekonomi domestik Indonesia, dan terutama terhadap UMKM. Laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Pandemi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. (Pakpahan, 2020) menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Negara Indonesia yang mendominasi Keberadaan usaha mikro kecil ataupun menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan sebagai tonggak perekonomian nasional Juga mengalami dampak yang amat serius sehingga tidak hanya aspek total produksi saja dan juga aspek perdagangan yang mengalami dampaknya Bahkan Lowongan pekerjaan atau beberapa tenaga kerja yang berada di Indonesia terpaksa harus kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan mereka dikala pandemi covid 19 ini. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi usaha kecil menengah atau bisa disebut kemenkop UKM menjelaskan bahwasanya pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 64.194.057 UMKM Yang berada pada negara Indonesia atau dalam persentase diperkirakan sekitar 99% dari unit usaha serta memperkerjakan kurang lebih terdapat 116.978.631 Tenaga kerja atau dalam presentasinya juga sekitar 97% dari keseluruhan total tenaga kerja yang berada pada sektor ekonomi.

Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM Terdapat kurang lebih sekitar 37 ribu UMKM yang mengajukan laporan jika mereka terkena efek serius dari dampak COVID 19. Dan effect series itu ditandai sekitar 56% juga melakukan terdapat Penurunan hasil penjualan dan beberapa persegi juga melaporkan lebih tepatnya sekitar 22% terkait problem pembayaran dari aspek pembiayaan. 15% lainnya juga melaporkan bahwa hanya terkait problem distribusi barang serta yang terakhir adalah 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. (Bahtiar & Saragih, 2020)

Dollar USA mengalami penguatan sehingga memicu kerassahan pada pasar global akibat Covid-19 serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan melemah terus terhadap nilai tukar dollar AS. Risiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktivitas biaya perawatan yang tinggi akibat banyaknya yang terdampak. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut (Dr. Syahriyah Semaun, SE., 2020). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kala wabah covid-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Ketiga Stimulus yang berkaitan dengan segala kebutuhan masyarakat terlebih pada beberapa bidang antara lain bidang usaha, bidang bisnis, bidang pajak dan lain sebagainya. Selain itu juga menteri Sri Mulyani lebih tepatnya Menteri Keuangan juga telah mengkoordinasikan hal ini bersama-sama Dengan beberapa institusi seperti bank, OJK, Lembaga penjamin simpanan dan lain sebagainya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Koordinasi tersebut telah memberikan beberapa keputusan dan terdapat dalam Keputusan Presiden RI Joko Widodo. Untuk meminimalisir efek negatif dari covid-19, tiga kebijakan ini di keluarkan untuk membantu beberapa sektor yang ada dalam masyarakat diantaranya :

1. **Stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti:**

- a. Melakukan bebas pajak penghasilan atau PPh pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengolahan. Mempertahankan daya kosumsi masyarakat yang bekerja disektor industri. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.
- b. Memberikan tunda pembayaran penghasilan impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Peraturan ini berlaku dari April hingga September 2020.
- c. Memberikan keringanan pajak PPh pasal 25 sebesar 60 % selama 6 bulan. Peraturan berlaku dari bulan April hingga September 2020. Program ini memberikan ruang *cash flow* untuk industri dengan keringanan pajak, berlaku pada April hingga September 2020
- d. Memberikan bebas pajak bagi restoran dan hotel selama 6 bulan. Program tersebut berlaku untuk 10 destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten. Peraturan ini berlaku pada bulan April hingga September 2020.

- e. Memberikan penyaluran untuk bantuan sosial secara cepat, subsidi untuk perumahan rakyat hingga program kartu pra-kerja.
 - f. Memberikan diskon- diskon khusus untuk tiket pesawat ke penerbangan tempat wisata tertentu.
 - g. Bantuan dan asuransi kepada para tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah virus corona.
 - h. Relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Digunakan untuk memberikan keringanan likuiditas pada perusahaan yang terdampak pandemi *Covid-19*.
2. **Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.**
Kebijakan non fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat meringankan kegiatan ekspor dan impor disaat pandemi wabah virus *covid-19* seperti:
- a. Mempercepat kegiatan impor dan ekspor untuk pelaku usaha yang memiliki reputasi yang baik.
 - b. Mempercepat proses impor dan ekspor dengan *National Logistic System*.
 - c. Pengurangan atau penyederhanaan pelarangan terbatas untuk kegiatan ekspor sehingga bisa memberikan kegiatan ekspor berjalan lancar serta dapat meningkatkan persaingan ekspor.
 - d. Pengurangan atau penyederhanaan pelarangan terbatas untuk kegiatan impor perusahaan yang berstatus sebagai produk pangan yang strategis, produsen dan komoditi obat, hotikultura, makanan dan bahan obat.
3. **Stimulus Untuk Sektor Keuangan**
Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu sektor perekonomian di antaranya :
- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi atau kelonggaran untuk emiten melakukan *buy-back* saham tanpa melakukan mekanisme dalam rapat umum pemegang saham.
 - b. Relaksasi atau kelonggaran restrukturisasi kredit
 - c. Relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja disektor yang terkena dampak *Covid-19*.
 - d. Bank Indonesia (BI) membuat aturan untuk *underlying* transaksi untuk para investor yang masuk Indonesia agar memperluas untuk melindungi nilai tukar rupiah.
 - e. Adanya penurunan untuk suku bunga acuan Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum Rupiah maupun valuta asing.

Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal, memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis diantaranya sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, penerbangan, industri perhotelan dan pengolahan untuk memberikan dorongan sektor pariwisata, yang merupakan sektor paling terdampak adanya pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing dan turis turis mancanegara, baik karena adanya berbagai aturan kebijakan baru maupun karena ketakutan yang sifatnya individu. Sehingga menyebabkan transaksi valuta asing (valas) melalui kegiatan usaha penukaran valas bukan bank mengalami penurunan yang signifikan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

METODE

Penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Data sekunder data yang diperoleh melalui studi literatur berupa buku untuk mencari teori yang relevan dengan penulisan ini dan jurnal karya ilmiah digunakan untuk mempelajari karya ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi terhadap umkm terdampak pandemi covid-19. Adapun data sekunder lainnya untuk mendukung penelitian ini yakni majalah dan *internet* berupa jurnal *online* dan berita yang berkaitan dengan pandemi covid-19.(Hermawan & Amirullah, 2016). Teknik analisis data yang digunakan (Prof. Dr. Sugiyono, 2016) analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan saat proses pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah itu dilakukan untuk pengumpulan data dalam periode tertentu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Global Pasca Covid-19

Prediksi pertumbuhan ekonomi global perlu dijadikan input bagi pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Banyak sekali lembaga – lembaga ekonomi internasional

maupun sejumlah ahli ekonomi yang telah merilis dan memberikan prediksi mengkhawatirkan terkait pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020, seperti JP Morgan dengan prediksinya pertumbuhan ekonomi minus 1,1 persen, dan IMF dengan prediksinya minus 3 persen untuk pertumbuhan ekonomi global tahun 2020. Sementara Sementara dalam pertumbuhan perekonomian yang ada di negara Indonesia. IMF Meramal bahwasanya negara Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan positif sebesar 6,5% dari target yang sudah ditentukan di awal sebesar 5% di tahun 2020. Sementara Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani juga memprediksikan bahwasanya pertumbuhan perekonomian negara Indonesia juga akan masih berkembang sekitar 0,3 sampai dengan 2,8% di tahun 2020 paska covid19 ini. Pada angka-angka tersebut bisa kita simpulkan bahwa Sanya pada jumlah UMKM dan kontribusi serta Opini prediksi dalam pertumbuhan ekonomi global di Indonesia ini mendapatkan salah satu perhatian khusus yang cukup serius dan bisa menjadi salah satu acuan dalam evaluasi pada negara atau pemerintahan dalam merancang kebijakan-kebijakan terkait strategi yang tepat untuk eksistensi UMKM yang berada di negara Indonesia. (Puspasari, 2020)

Pada Situasi pandemi saat ini cukup memberikan tantangan yang berat sekaligus menjadi awal peluang bagi pemerintah dalam memunculkan eksistensi wirausaha UMKM baru. diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Dilanjutkan dengan solusi jangka panjang, apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktifitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni: protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural.

Pertama, pemberlakuan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktifitas ekonomi UMKM. seperti, Penggunaan masker pada saat beraktivitas diluar rumah, memakai sarung tangan, dan jaga jarak (*social distancing*) dapat dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dan ini juga memerlukan kerjasama dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang terhadap pelaksanaan protokol covid-19 agar bisa berjalan dengan baik. Kedua, Kedua, pemerintah melakukan kebijakan struktural seperti, memberikan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM sebagai bentuk bantuan penundaan pembayaran kredit atau keringanan pembayaran. Selain itu, dalam proses menyederhanakan administrasi untuk mendapatkan pinjaman pada musim pandemi saat ini. Hal ini mampu untuk dilaksanakan oleh para pelaku UMKM karena hal ini Bertujuan agar para pelaku UMKM khususnya para pekerja tetap mampu tetap mempertahankan tingkat konsumsi serta daya belinya dan mendukung berjalannya roda perekonomian nasional.

Ketiga, Bantuan Kepada para pelaku UMKM. Pemerintah telah menyediakan beberapa anggaran sebesar kurang lebih 70,1 triliun untuk intensif sebagai dana perpajakan dan sebagai stimulus untuk perkreditan rakyat dari total anggaran yang sudah disediakan senilai 405,1 triliun guna untuk mengatasi pandemi covid 19 melalui APBN 2020. Pelaksanaan anggaran tersebut harus dilaksanakan dengan transparan jelas serta tepat sasaran agar eksistensi usaha mikro kecil menengah serta beberapa aktivitas perekonomian tetap mampu terjaga. Selain anggaran yang telah ditetapkan pemerintah juga menggandeng atau mendorong beberapa sektor-sektor diantaranya sektor perbankan baik itu bank milik negara maupun milik swasta Agar dapat memberikan bantuan berupa pinjaman untuk beberapa pelaku UMKM dengan sedikit memberikan kemudahan dalam proses peminjaman. Maka dari itu pemerintah mengajak beberapa bank agar tetap terhadap mekanisme peminjaman tapi juga harus memberikan kompensasi yang tidak memberatkan kepada beberapa peminjam yang peminjamnya tersebut adalah para pelaku UMKM Hal ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan yang akan merugikan salah satu pihak nantinya.

Keempat, Keempat, untuk kebijakan pada jangka panjang tidak hanya pada saat pandemi covid-19.. Kebijakan ini meliputi kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media *e-commerce* (belanja daring) untuk menjual produk-produk mereka. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya. (Sugiri, 2020)

Pemerintah dapat memulainya dengan membuat peta jalan pengembangan UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0 mulai dari pelatihan ulang (*re-training*) para pekerja UMKM guna beradaptasi dengan

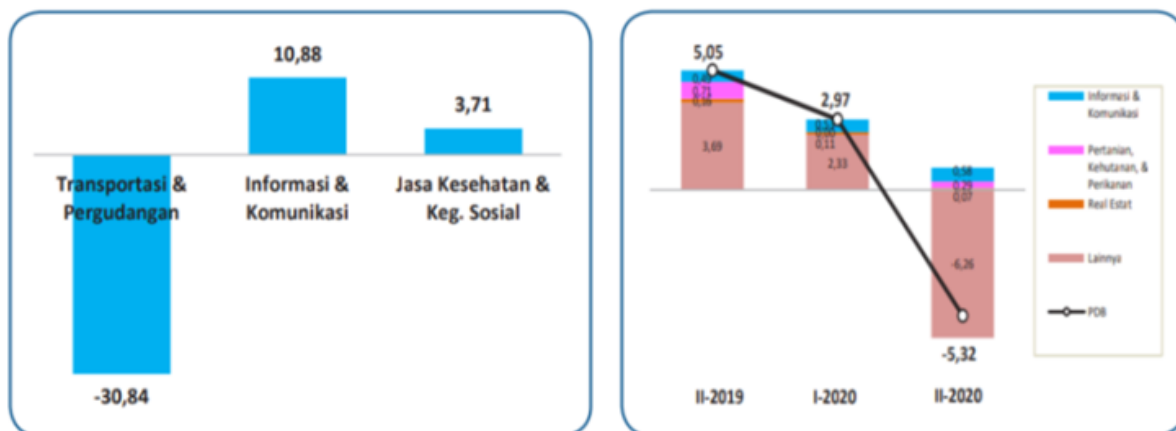
penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi digital, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital, serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar dan UMKM. Kebijakan struktural ini dilakukan untuk mendukung penguatan UMKM sekaligus mendukung pengembangan UMKM di era Industri 4.0. Cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi ini adalah dengan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan badan usaha-badan usaha milik negara (BUMN).

Pemerintah perlu mengeluarkan instruksi dan pedoman untuk seluruh BUMN agar mengalihkan dana TJSL yang ada untuk membantu secara langsung UMKM-UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Melibatkan UMKM dalam proses produksi BUMN bisa dengan berbagai bentuk, misalnya bila BUMN bergerak dalam produksi farmasi seperti produksi alat pelindung diri (APD), masker dan pakaian medis lain bisa melibatkan UMKM dalam proses produksinya. Melihat potensi pasar mengenai kebutuhan APD baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional, peluang ini dapat dimanfaatkan sekaligus memberi rasa aman ancaman pemutusan hubungan kerja atau penutupan produksi yang dialami UMKM dalam jangka pendek. Melihat potensi pasar mengenai kebutuhan APD baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional, peluang ini dapat dimanfaatkan sekaligus memberi rasa aman ancaman pemutusan hubungan kerja atau penutupan produksi yang dialami UMKM dalam jangka pendek. Untuk perusahaan swasta, dana TJSL juga bisa dialihkan untuk membantu UMKM yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Bentuk bantuan bisa dalam bentuk bantuan langsung seperti pemberian paket sembako atau pembelian produk-produk UMKM untuk kemudian disalurkan ke tempat lain. Tindakan seperti ini setidaknya dalam jangka pendek mampu memberikan rasa aman para pelaku UMKM.

2. Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19

Jumlah kasus persebaran covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga membuat perekonomian di Indonesia belum stabil hingga saat ini. Dari bulan Maret hingga Agustus 2020 kasus terkonfirmasi covid-19 kian meningkat pemerintah telah menyiapkan strategi khusus dalam penanganan pandemi covid-19 dengan membuat vaksin yang dikembangkan peneliti Indonesia melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. Dari segi ekonomi, pemerintah memberikan stimulus berupa penundaan pembayaran pinjaman kredit, stimulus ekonomi bagi UMKM dll.

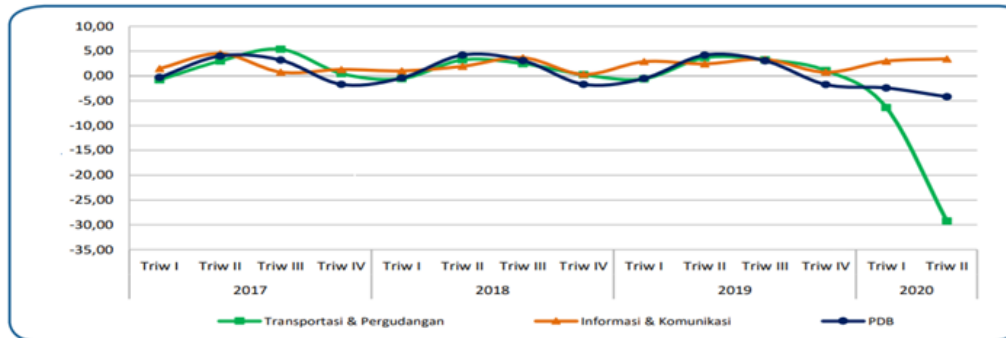
Belakangan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 yang turun 5,32 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 3.87,7 Triliun. Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami penurunan (kontraksi) yang sangat signifikan yaitu menurun sebesar 5,31 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya produksi hingga penurunan pada permintaan dan penawaran serta terhambatnya transportasi yang menjadi faktor lainnya.. Pada pengeluaran, terdapat komponen ekspor dan impor yang mengalami penurunan (*kontraksi*) pada triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019. (BPS, 2020)



Sumber : bps.go.id

Gambar Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha triwulan II - 2020

Pada pengeluaran, terdapat komponen ekspor dan impor yang mengalami penurunan (*kontraksi*) pada triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019. Faktor yang sangat mempengaruhi yaitu transportasi yang terhambat akibat dampak pandemi covid-19 ini. Dimana produksi menurun serta terbatasnya transportasi internasional sehingga terjadi kelangkaan barang ekspor dan impor. Sementara dari sisi pengeluaran pada seluruh komponen berkontraksi, dengan terjadinya kontraksi yang tertinggi pada Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu, kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen. (BPS, 2020)



Sumber : BPS. go.id

Gambar 4 Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha (q-to-q) dalam persen

3. Program Bantuan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Program bantuan uang tunai bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai 2,8 Triliun akan cair pada 17 Agustus 2020. Realisasi itu merupakan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memberikan stimulus akibat dampak pandemi covid-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta Ketua Pelaksana pencegahan Covid-19 menjelaskan bahwa realokasi dana senilai 2,8 triliun yang akan di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta besaran bantuan yang akan di peroleh pihak UMKM sebesar Rp. 2,4 juta kepada setiap pelaku UMKM. (Kurniasih Miftakhul Jannah, 2020)

Berikut tentang stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) :

1. Bantuan Diberikan kepada 12 juta UMKM. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan program produktif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) program ini sifatnya bantuan tunai dan bukan termasuk pinjaman yang harus dikembalikan. Dan diberikan langsung kepada 12 juta pelaku UMKM.
2. Anggaran 22 Triliun. Bantuan produktif dari pemerintah dengan anggaran dana 22 triliun yang sifatnya adalah hibah bukan pinjaman atau kredit.
3. Cair pada 17 Agustus 2020. Menteri keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah melalui kementerian koperasi dan UMKM melakukan verifikasi data pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2,4 juta. Bantuan tersebut untuk memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75
4. Kriteria Penerima. Kriteria penerima adalah belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Dan akan ditransfer sebesar Rp.2,4 juta.
5. 4,3 Juta Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dapat Bantuan. Direktur Utama Bank BRI Sunarso, mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat terdapat 4,3 juta nasabah yang berpotensi menjadi calon penerima bantuan tersebut. Dengan data nasabah memiliki tabungan dibawah 2 juta rupiah.

SIMPULAN DAN SARAN

Tidak ada negara yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID – 19 ini akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang dan menanti adanya vaksin untuk virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi masal.

Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri. Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian tentang dampak perekonomian nasional dengan adanya bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM maupun non UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19–24.
- BPS. (2020). STATISTIK Pertumbuhan Ekonomi. *Berita Resmi Statistik*, No. 15/02/(15), 1–12.
- Dr. Syahriyah Semaun, SE., M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 ; Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global. [Http://www.lainpare.Ac.Id/](http://www.lainpare.ac.id/), 1–2.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis Bandung. CV Alfa Beta.
- Kurniasih Miftakhul Jannah. (2020). Fakta Bantuan UMKM Rp2,4 Juta. [Https://Economy.Okezone.Com/](https://economy.okezone.com/).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *SIARAN PERS OJK KELUARKAN PAKET KEBIJAKAN LANJUTAN STIMULUS COVID-19 Jakarta, 2020–2022*.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA Bandung.
- Puspasari, R. (2020). Siaran Pers : Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, SP-27/KLI/(April), 17–21.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>